



---

ALTERNATIF PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA LOMBOK-SUMBAWA

Oleh

Muh. Jumail<sup>1)</sup> & Lia Rosida<sup>2)</sup>

<sup>1,2</sup>Dosen Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram

Email: <sup>1</sup>[thegurujoe@gmail.com](mailto:thegurujoe@gmail.com) & <sup>2</sup>[liarosida1990@gmail.com](mailto:liarosida1990@gmail.com)

**Abstrak**

proses perencanaan merupakan tindakan untuk menentukan masa depan, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Dari ketersediaan sumber daya, khususnya Pulau Sumbawa sesungguhnya memiliki beragam potensi dan atraksi wisata yang dapat dijadikan sebagai modal pengembangan kawasan baik dari aspek aksesibilitas, atraksi, amenitas, dan pendukung lainnya. Dilihat dari *brand name*-nya maka nama Lombok-Sumbawa adalah *icon* pariwisata NTB. Dua nama yang selalu dipadukan sebagai citra daerah (*county image*). Idealnya, ketika dua nama selalu bersandingan maka pengembangan pariwisata di kedua pulau tersebut semestinya berkembang secara merata. makalah ini adalah menciptakan sebuah model pengembangan kawasan terpadu melalui pendekatan difusi dengan mendasarkan pada ketersediaan sumber daya yang ada. Namun demikian, permasalahan pengembangan kawasan pariwisata Lombok-Sumbawa tidak terbatas pada aspek-aspek: proses perencanaan; unsur dan syarat perencanaan terpadu; dan model ideal perencanaan terpadu pengembangan kawasan pariwisata Lombok-Sumbawa. Proses perencanaan dan pengembangan pariwisata dapat dimulai dengan melibatkan semua *stakeholder* tanpa kecuali dalam menetapkan tujuan dan sasaran, mengidentifikasi sistem pariwisata (sumberdaya, organisasi, dan pemasaran), membuat alternative rencana, mengevaluasi alternative, memilih dan mengimplementasikan alternative, pemantauan dan evaluasi. Mempertimbangkan komponen atau unsur dan persyaratan perencanaan pengembangan pariwisata terpadu. Model pengembangan kawasan terpadu pariwisata Pulau Sumbawa yang ditawarkan adalah: Model konektifitas antardestinas, Model atraksi kawasan pariwisata terpadu, Model amenitas kawasan pariwisata terpadu, Model manajemen dan marketing organization (DMMO).

**Kata Kunci : Wisata Halal, Pulau Lombok, Potensi.**

**PENDAHUALUAN**

Pariwisata Nusa Tenggara Barat (NTB) sampai sekarang ini masih memfokuskan pengembangan kawasan pariwisata di Pulau Lombok. Padahal propinsi ini memiliki banyak potensi yang belum dikembangkan secara maksimal yang, tidak hanya terdapat di Pulau Lombok tetapi juga di Pulau Sumbawa. Kesenjangan pengembangannya diindikasikan dan disebabkan oleh pendekatan perencanaan yang tidak terpadu. Dengan demikian, keseimbangan antara kebutuhan dan keinginan stakeholders serta keinginan masyarakat lokal tidak bertemu.

Seperti diketahui bahwa proses perencanaan merupakan tindakan untuk

menentukan masa depan, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Dari ketersediaan sumber daya, khususnya Pulau Sumbawa sesungguhnya memiliki beragam potensi dan atraksi wisata yang dapat dijadikan sebagai modal pengembangan kawasan baik dari aspek aksesibilitas, atraksi, amenitas, dan pendukung lainnya. Namun sejak tiga decade terakhir sampai dengan sekarang ini, sumber daya wisata yang ada Pulau Sumbawa belum dapat dikembangkan secara maksimal. Hal inilah yang memperlebar kesenjangan pengembangan pariwisata di NTB.

Dari sudut pandang perencana (*planner*), secara fisik, lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya maka kawasan pariwisata di Pulau



Sumbawa tidak jauh berbeda sumber daya wisatanya dengan yang ada di Pulau Lombok. Dengan kata lain, aspek kelayakan pariwisata terpenuhi. Alasan mendasar lainnya, kesenjangan pengembangan dapat juga disebabkan oleh perbedaan perspektif pemodal, kemungkinannya rentang waktu pengembalian modal (*return of investment*) di Pulau Sumbawa dinilai cukup lama. Belum lagi masalah promosi dan pemasaran.

Dilihat dari *brand name*-nya maka nama Lombok-Sumbawa adalah *icon* pariwisata NTB. Dua nama yang selalu dipadukan sebagai citra daerah (*county image*). Idealnya, ketika dua nama selalu bersandingan maka pengembangan pariwisata di kedua pulau tersebut semestinya berkembang secara merata. Namun kenyataannya, ketimpangan pengembangan masih terjadi. Pariwisata di Pulau Sumbawa kondisinya masih sangat memperhatikan dan bahkan terkesan diabaikan. Konteks inilah yang menjadi fokus dalam makalah ini.

Berdasarkan fenomena dan kondisi *existing* kawasan pariwisata Lombok-Sumbawa maka fokus kajian dari makalah ini adalah menciptakan sebuah model pengembangan kawasan terpadu melalui pendekatan difusi dengan mendasarkan pada ketersediaan sumber daya yang ada. Namun demikian, permasalahan pengembangan kawasan pariwisata Lombok-Sumbawa tidak terbatas pada aspek-aspek: proses perencanaan; unsur dan syarat perencanaan terpadu; dan model ideal perencanaan terpadu pengembangan kawasan pariwisata Lombok-Sumbawa.

## LANDASAN TEORI

Ketersediaan literature yang berkaitan dengan perencanaan terpadu kawasan pariwisata Lombok-Sumbawa dapat dikatakan masih sangat terbatas dan yang menjadikannya sebagai topik kajian juga belum banyak yang menelitinya. Namun demikian, kajian-kajian terdahulu yang dianggap relevan antara lain: Fundeanu (2015) meneliti tentang model pengembangan pariwisata dengan system klaster inovatif regional menemukan bahwa kontribusi *Small*

*Medium Enterprises* (SME's) yang digabungkan dengan destinasi pariwisata menjadi salah satu model klaster pengembangan pariwisata di *South-West Polandia*.

Pelibatan organisasi lokal dan regional kepariwisataan dalam konteks koordinasi, audit promosi dan produk pariwisata menjadi langkah awal yang baik dalam memahami hubungan berbagai sumber daya lokal. Model yang ditetapkan adalah "*four clover leaves*" dengan empat pilar utama (usaha wisata, pendidikan dan penelitian, pemerintah, dan *catalyst broker*). Kajian ini memiliki relevansi dengan pengembangan kawasan pariwisata Lombok-Sumbawa, di mana dalam implementasinya dapat mengelaborasi keterlibatan SME's dan komponen destinasi wisata yang ada. Model "*four clover leaves*" juga dapat diadaptasikan sesuai dengan karakteristik kawasan pariwisata Lombok-Sumbawa.

Saito & Ruhanen (2017) meneliti tentang kekuasaan yang dimiliki *stakeholder* pariwisata, menegaskan bahwa ada empat jenis kekuasaan (*coercive, legitimate, induced, competent*). Salah satu kelemahan pengembangan kawasan pariwisata Lombok-Sumbawa terletak pada kekuasaan (pemerintah propinsi) yang belum sinkron dengan pemerintah kabupaten sehingga kebijakan pengembangannya masih terfokus pada satu destinasi saja. Jika keempat jenis kekuasaan (*coercive, legitimate, induced, competent*) dapat diimplementasikan secara nyata dan mendapat dukungan semua pihak maka kesenjangan pengembangan kawasan pariwisata Lombok-Sumbawa tidak akan terjadi.

Imre & Celebi (2017) meneliti tentang kenyamanan transportasi umum di Istanbul-Turki menegaskan bahwa jenis transportasi umum (public buses, ferries, rail system, Bus Rapid Transport (BRT) yang beroperasi faktor kenyamanan yang menentukan adalah: tingkat keramaian dalam kendaraan, fasilitas AC yang tersedia, informasi dan petunjuk, kebersihan kendaraan, kenyamanan tempat duduk, kondisi fisik dan kerusakan kendaraan. Kendala yang masih dihadapi pariwisata Lombok-Sumbawa salah satunya adalah masalah konektivitas



antardestinasinya yang belum terbangun dengan baik. Padahal aksesibilitas yang tersedia sudah memadai. Penyediaan transportasi publik bagi wisatawan ke destinasi yang masih menjadi hambatan. Konteks ini sangat relevan dengan fokus kajian yang sedang dilaksanakan.

Lopes dan Oliveira (2017) meneliti tentang pengembangan kota cerdas (*smart city*) dengan menekankan pada beberapa bidang intervensi seperti, pemerintahan, energy, mobilitas, sosial dan kualitas hidup masyarakat. Bidang mobilitas, berkaitan dengan penciptaan system mobilitas yang efisien dan terintegrasi melalui penggunaan *eco-efficient vehicle* (kendaraan efisien dan ramah lingkungan), penciptaan peluang baru bagi mobilitas kolektif, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung pembangunan system mobilitas yang cerdas. Kajian ini memberikan pemahaman yang luas tentang pentingnya intervensi dalam berbagai bidang untuk mengembangkan pariwisata khususnya pariwisata perkotaan dengan menerapkan konsep *smart city*.

Janusz and Bajdor (2013) menegaskan bahwa kerangka kerja, aktifitas, dan dimensi pengembangan pariwisata berkelanjutan di negara-negara Eropa setidaknya harus mempertimbangkan 12 aspek: kapasitas ekonomi; kemakmuran masyarakat; level kualitas pekerjaan; keseimbangan sosial; kepuasan pengunjung; pengawasan lokal; tingkat kepuasan masyarakat lokal; kekayaan budaya; integrasi fisik; keberagaman hayati; efisiensi sumber daya; dan lingkungan bersih. Lebih lanjut, langkah yang ditempuh untuk mewujudkannya adalah: menetapkan tujuan; implementasi; pengembangan; identifikasi dan evaluasi; analisis; dan data dasar.

Semakin jelas dan terarah pengembangan kawasan pariwisata Lombok-Sumbawa jika dapat mengelaborasi hasil kajian ini, di mana 12 aspek tersebut dapat dipertimbangkan dalam penerapan dan proses pengembangannya. Apalagi ditindaklanjuti dengan langkah-langkah seperti, menetapkan tujuan; implementasi; pengembangan; identifikasi dan evaluasi;

analisis; dan data dasar terhadap kondisi dan karakteristik destinasi kedua pulau.

Kilipiris & Zardava (2012) mengkaji tentang isu-isu pengembangan pariwisata berkelanjutan bagi pengusaha jasa/wisata menegaskan bahwa manfaat dari berbagai bentuk industry pariwisata yang baru harus diambil dengan cara: menyatukan semua *trend* dalam industri pariwisata dengan membawa produk baru yang relevan di pasar wisata; tour operator, travel agent, hotelier, dll dapat memanfaatkan isu ini untuk memperbaiki keunggulan bersaing dalam pasar; mengintegrasikan isu lingkungan, sosial, dan budaya ke dalam program pelatihan; mengupayakan status pekerja lokal pada semua tingkatan sebagai bagian esensi dari industri; menanamkan rasa bangga terhadap pekerjaan dan menjaga destinasi serta masyarakat; melatih staff untuk memahami kompleksitas dan karakteristik pariwisata modern; mengupayakan pendidikan multi-budaya dan pertukaran program; dan melatih staff lokal pada posisi manajerial dan pemimpin.

Berbagai isu tersebut menjadi penting untuk dimuat dalam wacana pengembangan kawasan pariwisata Lombok-Sumbawa agar hasilnya menjadi lebih komprehensif dan berkelanjutan. Diyakini bahwa isu-isu tersebut memainkan peran penting dalam membuka wawasan stakeholders pariwisata di NTB. Selain itu, isu tersebut juga dipandang relevan dan merepresentasikan kondisi nyata di kedua destinasi kepulauan. Dengan demikian, hasil kajian ini dapat memberikan kontribusi yang positif dalam rangka menciptakan model pengembangan kawasan pariwisata terpadu di Lombok dan Sumbawa.

## METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam makalah ini adalah *mix method*, di mana pendekatan kualitatif dan kuantitatif digabungkan baik dalam konteks pengumpulan data maupun analisisnya (Creswell, 2010). Hal ini juga dianggap relevan dengan pariwisata yang mengkaji berbagai fenomena (Jennings, 2001). Sementara itu, teori yang digunakan untuk



mendalami fokus kajian ini adalah *Rogers Theory*. *Rogers Theory* yang mengembangkan sebuah model untuk menjelaskan proses difusi-inovasi. Ada 4 elemen yang terlibat dalam proses ide, praktek, atau diseminasi objek yakni: (harus diklasifikasikan sebagai inovasi; harus dikomunikasikan melalui saluran (*channels*) tertentu; harus diadopsi oleh anggota dalam system sosial; dan harus mempertimbangkan durasi atau faktor waktu). Lebih lanjut, Roger megemukakan bahwa inovasi dapat berupa (ide, praktek atau objek) dengan karakteristik: semakin besar manfaat relatif (*relative advantage*) dari inovasi yang dipersepsikan oleh kelompok tertentu, semakin cepat tingkat adopsi yang dapat dilakukan.

Teori ini digunakan untuk menjelaskan, mendalami, dan membedah permasalahan kesenjangan pengembangan kawasan pariwisata Lombok-Sumbawa melalui proses difusi-inovasi dari berbagai perspektif *stakeholders* dengan mempertimbangkan manfaat relatif baik yang berbentuk financial maupun yang non-finansial yang mungkin dapat digali lebih komprehensif sesuai dengan karakteristik kedua destinasi.

Lebih lanjut, metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka, dokumentasi, observasi, dan *on-site survey*. Teknik penelusuran pustaka bertujuan untuk mengkaji teori, konsep dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan baik yang bersumber dari buku, jurnal, maupun dokumen-dokumen penting lainnya. Hasil-hasil kajian terdahulu yang dianggap relevan dianalisis, dielaborasi, disintesis dan dicarikan intinya sebagai pembandingan dengan topic kajian yaitu model pengembangan terpadu kawasan pariwisata Lombok-Sumbawa. Analisis mendalam terhadap kepustakaan berguna untuk memperkaya teori, memperkuat konsep, dan merekonstruksi fakta-fakta penelitian sehingga menghasilkan data valid. Dokumentasi sebagai “bukti bisu” dapat memperkuat hasil pengumpulan data sekunder dari segi bukti fisik. Adapun dokumentasi dalam penelitian ini seperti, brosur, video, memo, majalah, peta, poster, otobiografi, dan lain-lain.

Kemudian, dilakukan analisis terhadap isi (*content analysis*) (Jennings, 2001: 180).

Observasi dan *on-site survey* dilakukan langsung di kedua kawasan pariwisata Lombok-Sumbawa dengan memilih lokasi (destinasi) yang dianggap mewakili sesuai dengan Perda No.9 Tahun 1989, ada 9 kawasan wisata di Pulau Lombok yakni: (1) kawasan Sire, Gili Air, Gili Meno, Gili Trawangan, Senggigi dan sekitarnya; (2) kawasan Suranadi dan sekitarnya; (3) kawasan Gili Gede dan sekitarnya; (4) kawasan Kuta, Seger, Ann dan sekitarnya; (5) kawasan Selong Belanak dan sekitarnya; (6) kawasan Rinjani dan sekitarnya; (7) kawasan Gili Indah dan sekitarnya; (8) kawasan Gili Sulat dan sekitarnya; (9) kawasan Dusun Sade dan sekitarnya.

Kawasan wisata Pulau Sumbawa fokusnya adalah Kawasan Sumbawa Barat di Taliwang dan Pulau Bungin, Kawasan Sumbawa Besar di Kota Sumbawa Besar dan Pulau Moyo, Kawasan Bima dan Dompu di Gunung Tambora dan sekitarnya. Semua kawasan tersebut telah menjadi *icon* destinasi masing-masing pulau. Lebih lanjut, teknik analisis data yang dipergunakan dalam makalah ini adalah metode analisis data kualitatif dan kuantitatif (*mix method*). Namun secara umum, metode yang dominan adalah kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Proses Perencanaan Terpadu Pengembangan Kawasan Pariwisata Lombok-Sumbawa

Permasalahan pertama yang dihadapi pariwisata NTB adalah kesenjangan pengembangan. Kesenjangan ini tidak hanya pada aspek destinasi tetapi juga pada aspek kebijakan. Lebih lanjut, pada proses perencanaan diindikasikan bahwa *stakeholder* pariwisata tidak dilibatkan semuanya. Hal ini dapat dilihat dari Musrenbang yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi yang mengundang semua unsur OPD kabupaten dan kota di NTB dan *stakeholder* terkait yang kehadirannya hanya untuk menyetujui perencanaan, program, dan pembiayaan yang telah disusun sebelumnya. Di sinilah letak permasalahan yang sesungguhnya

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

Open Journal Systems



bahwa pelibatan dalam proses perencanaan idealnya sejak awal hingga tahapan evaluasi. Namun yang terjadi adalah formalitas belaka.

Semestinya, langkah proses perencanaan dan pengembangan pariwisata yang dimulai dari menetapkan tujuan dan sasaran, mengidentifikasi sistem pariwisata (sumberdaya, organisasi, dan pemasaran), membuat alternative rencana, mengevaluasi alternative, memilih dan mengimplementasikan alternative, pemantauan dan evaluasi (Paturusi, 2018) semua pihak harus dilibatkan tanpa kecuali. Jika hal ini dapat dilakukan maka kesenjangan yang terjadi pasti tidak menimbulkan permasalahan. Kesempatan lain yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah propinsi adalah dengan membuat alternatif rencana dengan mengundang semua OPD kabupaten dan kota. Pada tahap ini, *stakeholder* pariwisata khususnya yang berasal dari Pulau Sumbawa diberikan kesempatan untuk mengkritisi, menyarankan, dan menawarkan rekomendasi-rekomendasi terkait dengan pengembangan kawasan daerahnya.

Di sinilah pentingnya untuk menerapkan teori *stakeholder* dengan melibatkan semua pemangku kepentingan pariwisata, dengan memfokuskan dan mempertimbangkan pada karakteristik, perilaku, dan penghargaan terhadap peran *stakeholders* yang berada di destinasi. Sebagai contoh kasus, kebijakan Gubernur NTB yang mengembangkan wisata halal. Terlihat kesenjangan yang sangat lebar antara pariwisata Lombok dan Sumbawa, di mana penghargaan yang diraih dalam kompetisi wisata halal dunia, semua kategori dimenangkan oleh Pulau Lombok selama dua tahun berturut-turut. Dengan kata lain, tidak ada satu pun destinasi yang ada di Pulau Sumbawa dipromosikan dan dipasarkan sehingga mendapatkan kesempatan yang sama dalam ajang kompetisi wisata halal dunia seperti halnya Pulau Lombok.

Setelah itu, penting untuk mengevaluasi alternative yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan skala prioritas dari rencana pengembangan kawasan pariwisata di Pulau Lombok-Sumbawa. Kesepakatan dan komitmen *stakeholder* dalam menilai kelayakan

destinasi yang akan dikembangkan dengan mempertimbangkan manfaat relative yang ada memainkan peran penting dalam menyukseskan rencana pengembangan. Berikutnya, memilih alternatif dan implementasi merupakan langkah aksi, bentuk komitmen dan konsistensi *stakeholder* dalam menerjemahkan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan. Akhirnya, pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan dan menyeluruh adalah langkah terakhir pada proses perencanaan.

Konteks ini dapat diwujudkan jika *Roger Theory* dapat diimplementasikan dengan baik. Faktor yang menentukan keberhasilannya adalah proses ide, praktek, atau diseminasi objek, dalam hal ini perangkat atau organisasi kepariwisataan yang telah berjalan dengan baik di Pulau Lombok dapat diadopsi untuk mengembangkan pariwisata di Pulau Sumbawa. Namun demikian, perlu juga mempertimbangkan bahwa tidak semua system kepariwisataan Lombok yang mencul dalam bentuk organisasi sesuai dengan yang ada di Sumbawa. Untuk itu, perlu adanya klasifikasikan sebagai inovasi, dikomunikasikan melalui saluran (*channels*) tertentu, diadopsi, dan mempertimbangkan durasi atau faktor waktu.

Lebih lanjut, teori ini jika diimplementasikan dengan segera maka semakin besar manfaat relatif (*relative advantage*) dari inovasi yang dipersepsikan oleh kelompok tertentu, semakin cepat tingkat adopsi yang dapat dilakukan. Dalam hal ini, keberadaan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) yang telah memainkan peran penting dalam memromosikan dan memasarkan pariwisata Lombok-Sumbawa dapat segera diadopsi. Dengan demikian, proses perencanaan pengembangan kawasan terpadu pariwisata Lombok-Sumbawa dapat diupayakan. Jika diilustrasikan proses tersebut maka tampak seperti tabel 1 berikut.

Tabel 1. Proses Perencanaan, Program dan Rencana Aksi Program Pengembangan Kawasan Terpadu Pariwisata Lombok-Sumbawa

| Proses Perencanaan | Rencana Program | Rencana Aksi |
|--------------------|-----------------|--------------|
|--------------------|-----------------|--------------|



|  |  |  |
|--|--|--|
| Menetapkan tujuan dan sasaran              | Pengembangan destinasi wisata Pulau Sumbawa                                      | Membangun infrastruktur dan konektivitas antardestinasi  |
| Mengidentifikasi system pariwisata         | Inventarisasi potensi, pembentukan manajemen pengelolaan destinasi dan pemasaran | Mengembangkan (optimalisasi pemanfaatan) sumberdaya wisata, membentuk DMMO (Destination Management and Marketing Organization) |
| Membuat alternative rencana                | Diversifikasi produk wisata  | Mengembangkan wisata alam, budaya, dan alternative   |
| Evaluasi alternative                       | Fokus pada keunikan produk   | Rekomendasi pengembangan produk wisata alam, budaya, dan alternative   |
| Memilih dan mengimplemntasikan alaternatif | Pengembangan wisata alam, budaya, dan alternative                                | Pengembangan pulau-pulau kecil dan wisata alternative petualangan  |
| Pemantauan dan evaluasi                    | Penetapan penanggung jawab monev (DMMO, institusi                                | Asesmen, uji publik dan model pengembangan   |

|  |                                    |  |
|--|------------------------------------|--|
|  | pendidikan, community leader, LSM) |  |
|--|------------------------------------|--|

Sumber: Hasil Elaborasi Penulis, 2018.

Perencanaan pariwisata sebagai sebuah pendekatan berfungsi untuk mendalami, menganalisis, dan menghubungkan faktor-faktor yang berkaitan dengan pengembangan kawasan pariwisata, kemudian menginterpretasikan sejauhmana perencanaan tersebut memiliki hubungan dengan rencana, program, dan implementasi. Perencanaan pariwisata terjadi dalam beberapa bentuk, misalnya pembangunan infrastruktur, promosi dan pemasaran. Perencanaan pariwisata cenderung merupakan campuran dari berbagai aspek seperti, ekonomi, sosial dan lingkungan, yang lebih terintegrasi dan menjadi bagian integral dari perencanaan sektor publik (Hall and Page, 1999: 307).

Dengan demikian, perencanaan pariwisata dapat dijadikan sebagai sebuah pendekatan dalam mengembangkan kawasan terpadu pariwisata dengan tetap mempertimbangkan faktor pengaruh, seperti ekonomi, sosial, lingkungan, kondisi infrastruktur, dan aspek promosi dan pemasaran. Pada konteks yang berbeda, Paturusi (2008: 91) mengemukakan bahwa perencanaan suatu kawasan wisata merupakan upaya untuk mengembangkan produk wisata. Kawasan wisata yang direncanakan, pengembangannya harus memperhatikan karakteristik kawasan baik alam maupun budaya yang menjadi potensi dalam pengembangannya. Dengan demikian, pendekatan perencanaan pariwisata dengan pengembangan kawasan wisata memang menjadi domain yang saling membutuhkan.

**Unsur-Unsur dan Persyaratan Perencanaan Terpadu Pengembangan Kawasan Pariwisata Lombok-Sumbawa**

Dengan mendasarkan pada pengembangan kawasan pariwisata Lombok yang memiliki *icon* wisata masing-masing, misalnya Lombok Barat dengan Pantai Senggigi, Lombok Tengah dengan Pantai Kuta, Lombok



Utara dengan Gili Trawangan, Lombok Timur dengan Air Terjunnya, dan Kota Mataram dengan wisata kotanya. Apabila *icon-icon* wisata tersebut diasumsikan sebagai contoh pengembangan pariwisata di Pulau Sumbawa maka peta pengembangannya akan tampak seperti tabel 2 berikut.

Tabel 2. Peta Pengembangan Kawasan Pariwisata Pulau Sumbawa.

| Kawasan Pengembang an | Bentuk Pengembang an        | Potensi Pengembang an               |
|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| Sumbawa Barat         | Wisata alternative          | Danau dan kuliner                   |
| Sumbawa Besar         | Wisata alam dan budaya      | Pulau-pulau kecil (bungin dan moyo) |
| Dompu                 | Wisata alam-petualangan     | Gunung Tambora, Lakey               |
| Kota Bima             | Wisata kota dan peninggalan | Istana kesultana, museum,           |

Sumber: Hasil Elaborasi Penulis, 2018.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa keempat kawasan pengembangan pariwisata yang ada di Sumbawa maka Sumbawa Barat dengan format wisata alternative yang memanfaatkan danau dan kuliner sebagai *icon* wisatanya memiliki prospek dan keunggulan bersaing yang dapat diandalkan. Taliwang sebagai ibukota kabupaten akan diajdiikan sebagai pusat kuliner dan Danau Rea sebagai tempat rekreasi wisata air.

Berikutnya, Kab. Sumbawa Besar yang memiliki dua pulau kecil yang telah memiliki citra dan reputasi sebagai destinasi wisata nasional dan bahkan internasional dapat dimaksimalkan dan dioptimalkan pengembangannya. Pulau Bungin dan Moyo sebagai destinasi wisata kepulauan dapat berkembang lebih baik apabila konektifitas antardestinasai baik dengan yang ada di Pulau Lombok maupun di Pulau Sumbawa diyakini dapat tumbuh sebagai destinasi wisata alam dan budaya yang kompetitif. Potensi budaya yang ada

di Sumbawa Besar sangat bervariasi (balapan kuda, seni *sakeco*, dll).

Dompu dengan Taman Wisata Gunung Tambora, Pantai Lakey dan Hu;u yang telah berkembang secara alami sebagai destinasi alam dan petualangan. Pengembangan kawasan ini juga merupakan replika dari model pengembangan wisata Taman Nasional Gunung Rinjani di Lombok. Kelebihan dari kawasan ini adalah lokasi yang sejalur dengan pusat wisata *surfing* di Lakey dan Hu'u. Dengan kata lain, wisatawan dapat melanjutkan perjalanannya setelah menikmati wisata *trekking* di Tambora menuju Lakey dan Hu'u untuk wisata selancar.

Kota Bima yang memiliki banyak potensi sejarah dan peninggalan (istana kesultanan, istana raja, museum, dll) tepat untuk dikembangkan dengan format wisata kota dan *heritage*. Karakteristik wisatanya hampir sama dengan wisata kota dan budaya di Kota Mataram. Konsep ini juga akan mampu meningkatkan citra dan reputasi Kota Bima sebagai destinasi alternative di NTB. Dengan demikian, keempat kawasan wisata yang ada di Pulau Sumbawa jika dikembangkan dengan maksimal maka dapat diprediksi dapat tumbuh dan berkembang seperti halnya pariwisata di Pulau Lombok.

Dari konsep pengembangan kawasan yang telah dipaparkan tadi, untuk memastikan langkah selanjutnya menuju kawasan pariwisata terpadu adalah membuat alternatif pilihan. Pilihan realistik yang dimaksud adalah dengan menetapkan prioritas pengembangan, misalnya di setiap kawasan terdapat satu destinasi unggulan yang dijadikan sebagai pemicu untuk mengembangkan destinasi lainnya di dalam satu kawasan. Hal ini menjadi gambaran bahwa ada tujuan yang jelas dan terukur yang ingin dicapai dengan mendasarkan pada potensi *existing* dan prediksi yang telah dibuatkan sebelumnya. Dengan demikian, untuk memperkuat komitmen pengembangan, peran pemerintah propinsi dan kabupaten dalam membuat kebijakan pengembangan menjadi kunci suksesnya program ini.

Berdasarkan pola pengembangan kawasan pariwisata di Pulau Lombok maka



pengembangan kawasan pariwisata di Pulau Sumbawa dapat meniru pola pengembangan yang membentuk *icon* destinasi. Lebih lanjut, aspek yang harus dipadukan dalam konteks ini adalah: *accessibility, attractions, amenity, ancillary*. Aksesibilitas berkaitan dengan konektifitas (jalan dan transportasi) untuk menjangkau destinasi dari dan ke Lombok-Sumbawa. Moda transportasi dan akses jalan menuju destinasi yang ada di Pulau Sumbawa sudah harus disediakan secara memadai dan dibangun sesuai dengan standar

Tabel 3 menggambarkan aspek keterpaduan pariwisata Lombok-Sumbawa seperti berikut

| Kawasan Pariwisata Lombok                  |                     |                    | Kawasan Pariwisata Sumbawa |                                   |             |
|--|---------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------|
| KPP  | PPP                 | BPP                | KPP                        | PPP                               | BPP         |
| Sire, Gili Tramen, Senggigi dan sekitarnya | Tramen dan Senggigi | Bahari-alam-budaya | Sumbawa Barat              | Taliwang dan Pulau Bungin         | Budaya-alam |
| Suranadi dan sekitarnya                    | Taman Narmada       | Bahari-budaya      | Sumbawa Besar              | Kota Sumbawa Besar dan Pulau Moyo | Budaya-alam |
| Gili Gede dan sekitarnya                   | Nunggu              | Alam-budaya        | Bima                       | Kota Bima                         | Budaya      |
| Kuta, Seger, Ann dan sekitarnya            | Kuta                | Alam-budaya        | Dompu                      | Lakey, Hu'u dan Gunung Tambora    | Alam        |
| Selong Belanak dan sekitarnya              | Selong Belanak      | Alam               |                            |                                   |             |
| Rinjani dan sekitarnya                     | Senaru              | Alam-budaya        |                            |                                   |             |
| Gili Indah dan sekitarnya                  | Gili Indah          | Alam-budaya        |                            |                                   |             |
| Gili Sulat dan sekitarnya                  | Gili Sulat          | Alam               |                            |                                   |             |
| Dusun Sade dan sekitarnya                  | Sade                | Budaya             |                            |                                   |             |

Sumber: Hasil Elaborasi Penulis, 2018.

Keterangan:

KPP : Kawasan Pengembangan Pariwisata

PPP : Pusat Pengembangan Pariwisata

BPP : Bentuk Pengembangan Pariwisata

Daya tarik juga dapat menjadi penghubung terbentuknya konektifitas antardestinas. Dengan menerapkan manajemen atraksi wisata melalui promosi dan pemasaran dari tour operator, atraksi wisata juga dapat dipadukan berdasarkan kekhasan atau keunikannya. Keberadaan hotel dan akomodasi pendukung lainnya dilihat pola persebaran baik dari segi *brand* hotel, *chain*, maupun segmen tamu yang menginap sedangkan aspek terakhir berkaitan dengan organisasi lokal yang mendukung pengembangan pariwisata. Pentingnya untuk membentuk DMO yang dapat memainkan peran vital dalam mengelola destinasi yang baru berkembang.

Selanjutnya, untuk memadukan pengembangan kawasan pariwisata di Pulau Sumbawa maka diperlukan perencanaan yang jelas dan terukur. Adapun indikatornya seperti tabel 4 berikut.

Tabel 4. Komponen Pengembangan Kawasan Pariwisata Terpadu di Pulau Sumbawa

| Komponen   | Keterangan   |
|--|--|
| Lokasi daya tarik wisata   | Taliwang, Pulau Bungin, Kota Sumbawa Besar, Pulau Moyo, Kota Bima, Pantai Lakey, Hu'u, Gunung Tambora,               |
| Kawasan konservasi   | Pulau Bungin, Pulau Moyo, Gunung Tambora   |
| Arah menuju lokasi (hotel, akomodasi, pertokoan, rekreasi, taman, dll) | Hotel dan akomodasi lainnya dan pertokoan di pusat kota. Tempat rekreasi dan taman wisata di pinggiran kota          |
| Jaringan transportasi  | Transportasi umum (bus, angkutan tradisional, dan roda dua) dari dan ke destinasi                                    |
| Jalur pedestrian   | Berada di jalanan pusat kota, bahu jalan tertata dengan baik, marka penyebarangan pejalan kaki terpasang dengan baik |
| Terminal   | Berada di pusat kota dan pelabuhan menuju pulau kecil (Bungin dan Moyo)  |
| Prasarana pendukung  | Klinik, puskesmas, money changer, kantor pos, kantor polisi, dan ATM di setiap destinasi                             |
| Studi dampak spesifik  | Pulau Bungin: keramaian dan kepadatan penduduk. Pulau Moyo: isolasi penduduk lokal                                   |
| Aplikasi arsitektur lokal, lansekap, ketinggian bangunan               | Hotel bercirikan arsitektur lokal. Ketinggian bangunan tidak dibatasi  |
| Pola arus wisatawan  | Individual dan rombongan   |

Sumber: Hasil Elaborasi Penulis, 2018.



## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa teori *Stakeholder* dan *Roger Theory* belum terimplementasi dengan baik sehingga kesenjangan pengembangan kawasan pariwisata Lombok-Sumbawa masih menyisakan banyak permasalahan. Dengan demikian, untuk menutupi kesenjangan tersebut maka:

1. Proses perencanaan dan pengembangan pariwisata dapat dimulai dengan melibatkan semua *stakeholder* tanpa kecuali dalam menetapkan tujuan dan sasaran, mengidentifikasi sistem pariwisata (sumberdaya, organisasi, dan pemasaran), membuat alternative rencana, mengevaluasi alternative, memilih dan mengimplementasikan alternative, pemantauan dan evaluasi.
2. Mempertimbangkan komponen atau unsur dan persyaratan perencanaan pengembangan pariwisata terpadu seperti:
  - a. Asumsi yang didasarkan atas fakta
  - b. Ada alternatif pilihan
  - c. Ada tujuan yang ingin dicapai
  - d. Bersifat memprediksi
  - e. Memiliki produk kebijakan yang akan dilaksanakan
3. Model pengembangan kawasan terpadu pariwisata Pulau Sumbawa yang ditawarkan adalah:
  - a. Model konektifitas antardestinas
  - b. Model atraksi kawasan pariwisata terpadu
  - c. Model amenitas kawasan pariwisata terpadu
  - d. Model manajemen dan marketing organization (DMMO)

### Saran

Dari kesimpulan di atas maka saran yang dapat ditawarkan adalah:

1. Segera mengimplementasikan rencana aksi dari program pengembangan yang telah ditetapkan
2. Segera membentuk badan atau otoritas pengelola seperti, DMMO, BPPD, LSM dan organisasi lokal lainnya terkait pariwisata.
3. Menerapkan keempat model secara konsisten dalam pengembangan kawasan pariwisata terpadu Pulau Sumbawa

### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Creswell, J.W., 2010. Research Design. Edisi Ketiga. (terj). Pendekatan
- [2] Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- [3] Dibra, Mirjam, 2015. Rogers Theory on Diffusion of Innovation-The Most
- [4] Appropriate Theoretical Model in the Study of Factors Influencing the Integration of Sustainability in Tourism Business. *Procedia-Social and Behavioral Science* 195 (2015) 1453—1462.
- [5] Fundeanu, D.D., 2015. Innovative Regional Cluster, Model of Tourism
- [6] Development. 2<sup>nd</sup> Global Conference on Business, Economics, Management and Tourism. *Procedia Economics and Finance*. 23 (744—749).
- [7] Imre, S., dan Celebi, D., 2017. Measuring Comfort in Public Transport: A case
- [8] study for Istanbul. *World Conference on Transportation Research-WCTR 2016 Shanghai. Transportation Research Procedia* 25 (2017) 2441—2449.
- [9] Janusz, G.K., and Bajdor, P. 2013. Toward to Sustainable Tourism-Framework, Activities and Dimensions. *Procedia Economics and Finance* 6. 523—529.
- [10] Jennings, Gayle. 2001. *Tourism Research*. Australia: John Wiley & Sons
- [11] Australia, Ltd. Kilipiris, F., and Zardava, S. 2012. Developing Sustainable Tourism in a Changing Environment: issues for the tourism enterprises (travel agency and hospitality enterprises). *Procedia. Social and Behavioral Sciences*. 44. 44—52.



- 
- [12] Lopes, I.M., dan Oliveira, P. 2017. Can a small city be considered a smart city? *Procedia Computer Science* 121. 617—624.
- [13] Moleong, J. Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- [14] Sugyono. 2004. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : CV. Alfabeta.
- [15] Saito, H., and Ruhanen, L., 2017. Power in Tourism Stakeholder Collaboration:
- [16] Power types and power holders. *Journal of Hospitality and Tourism Management*. 31 (2017) 189—196.